

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD  
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
BULAN MARET DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR**

**A. Waktu Penyelenggaraan Rakor**

Rabu, 6 April 2022

**B. Pimpinan Rakor**

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

**C. Peserta Rakor**

1. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
2. Sekretaris Dinas dan Pejabat Eselon III
3. Pejabat Struktural Eselon IV dan Fungsional/Sub Koordinator pada masing-masing bagian atau seksi
4. Bendahara dan Bendahara Pembantu
5. Pelaksana pada masing-masing Bidang

**D. Notulis**

Sub Bagian Program

**II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI**

**A. Realisasi sampai dengan bulan ini**

- a. Fisik = 26,09 %  
b. Keuangan = 4.342.196.434 (22,90%)

**B. Kegiatan yang berdeviasi fisik**

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.600.000			16.780.000		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	57.600.000	33,68	31,77	16.780.000	(1,91)	Menyesuaikan kebutuhan
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>							
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>							
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>							

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	10.000.000				0	
1	Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Kab/Kota	10.000.000	100	0	0	(100)	Pelaksanaan kegiatan menunggu SE Gubernur tentang penyusunan PPRG pada OPD Kab/Kota disahkan oleh Gubernur, dikarenakan SE tersebut akan disosialisasikan pada kegiatan tersebut dan menjadi salah satu dasar pelaksanaan PUG di kab/kota
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>							
<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	675.000				0	
1	Koordinasi Pengembangan Kapasitas Petugas Penunjang Layanan Perempuan dan Anak Kab/Kota	675.000	44	0	0	(44)	pelaksanaan bulan april
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat</b>							
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>							
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59.338.000				1.494.467	
1	Persiapan Pelatihan HAM Bagi Kelompok Perempuan Rentan	1.374.000	100	50,51	670.457	(49,49)	SSK baru terlaksana sebagian karena menyesuaikan

							dengan mitra terkait
2	Pelaksanaan pelatihan HAM bagi Kelompok Perempuan Rentan	9.694.000	72,91	8,49	824.010	(64,42)	SSK belum terlaksana karena menyesuaikan mitra kerja
3	Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	7.466.000	100	0	0	(100)	Kegiatan menyesuaikan dengan mitra kerja terkait
4	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	16.294.000	100	0	0	(100)	Kegiatan menyesuaikan dengan mitra kerja terkait
5	Kegiatan Operasional DWP Tahun 2020	7.860.000	33,33	0	0	(33,33)	Penyesuaian pada e-blangkon sehingga belum dapat terlaksana
6	Kegiatan Perjalanan Dinas DWP Provinsi Jawa Tengah ke Kab/ Kota	16.650.000	20	10	0	(10)	SSK baru sebagian dilaksanakan
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>							
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>							
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000			0		
1	Rapat Koordinasi APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia)	2.000.000	100	50	0	(50)	SSK baru dilaksanakan sebagian
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :		10	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :		1	0	0			

### III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

#### Permasalahan

Permasalahan antara lain :

1. Data terkait MKJP, Unmetneed, CPR, Tribina, UPPKA, PPKBD yang tadinya di DALAP BKKBN dialihkan ke Aplikasi Data New SIGA BKKBN sehingga data tersebut belum dapat diakses;
2. Belum semua Kabupaten/Kota belum mampu menyusun GDPK;
3. Belum optimalnya Ketersediaan data gender dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan yang berhubungan dengan mitra kerja terkait (DWP dan BKOW) ada belum dapat dilaksanakan;
5. Perubahan indikator KLA 2021 dan 2022.

#### Upaya

Upaya mengatasi permasalahan tersebut :

1. Koordinasi dengan produsen data (BKKBN);
2. Advokasi Kabupaten/Kota yang belum menyusun GDPK;
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Surat Edaran Kepala OPD ke Kabupaten/Kota, OPD/instansi vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Tengah untuk pengisian pada Aplikasi SIGA. Berkoordinasi dengan Biro Kesra untuk optimalisasi ketersediaan data;
4. Koordinasi dan menyesuaikan jadwal dan kebutuhan mitra kerja terkait (DWP dan BKOW);
5. Perlu adanya pendampingan pengisian penilaian mandiri KLA.

### IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Bulan April :

1. Kegiatan Pengembangan Media KIE di Kota Semarang, Kab. Rembang, Kab. Brebes (KB KIE);
2. Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung KB (DALDUKKS);
3. Monitoring dan Evaluasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan di Kabupaten/Kota (DALDUKKS);
4. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Siaga Kependudukan (DALDUKKS);
5. Rapat Koordinasi SIGA Kabupaten/Kota dan Provinsi (DATA);
6. Pelatihan HAM Bagi Kelompok Perempuan Rentan (PARMAS);
7. Peringatan Hari Kartini (DWP) (PARMAS);
8. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dan Stunting (PARMAS);
9. Pemantauan Pengisian Mandiri KLA Kabupaten/Kota (PHA);
10. Pelatihan PPEP dan Peningkatan Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan (KHPP).

### V. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya.
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas.
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan.
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal.
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD

6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dan RAB tahun 2023 dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya.

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan Maret 2022, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi
1	Dinas Perempuan dan Anak	22,71	26,09	23,27	3,38
2	Sekretariat	24,27	26,96	23,12	2,69
3	Bidang KHPP	18,86	21,25	20,41	2,39
4	Bidang PHPA	21,16	26,98	23,63	5,82
5	Bidang KB KIE	25,16	35,00	31,74	9,84
6	Bidang DALDUK KS	13,19	18,04	14,87	4,85
7	Bidang Data Parmas	22,55	28,18	23,27	5,62

Demikian laporan pelaksanaan rapatkoordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Maret 2022 untuk menjadikan perkiksa.

Semarang, Rabu, 6 April 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**



**Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM**

**NIP. 196811241993102001**